PAPUA PEGUNUNGAN DALAM BAYANG-BAYANG INFLASI: TELAAH KRITIS ATAS FENOMENA DEPENDENSI DALAM BINGKAI EKONOMI POLITIK

Handrianus K. Belolon
Program Studi Antropologi, Fakultas Antropologi dan Sosial Sains
Universitas Okmin Papua
e-mail: hardybaslon@gmail.com

ABSTRAK

Papua Pegunungan mengalami tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk tingginya tingkat inflasi yang menghambat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama di balik masalah ini adalah ketergantungan ekonomi terhadap wilayah pusat dan negara-negara maju dalam hal suplai bahan pokok, teknologi, serta kebijakan ekonomi. Artikel ini mengulas fenomena inflasi di Papua Pegunungan melalui pendekatan kritis teori dependensi, yang berfokus pada hubungan asimetris antara wilayah pinggiran dan pusat. Dengan menggunakan kerangka berpikir ekonomi politik, artikel ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang berkelanjutan berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan rentan terhadap kemiskinan. Karena itu, perlu rancangan strategis untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif sebagai jalan keluar dari cengkraman bayang-bayang inflasi.

Kata kunci: inflasi, dependensi, Papua Pegunungan, ekonomi politik, ekonomi lokal, ekonomi inklusif

ABSTRACT

Mountainous Papua faces significant economic challenges, including high inflation rates that hinder social development and community welfare. One of the primary factors behind this issue is economic dependency on central regions and developed countries for essential supplies, technology, and economic policies. This article examines the phenomenon of inflation in Mountainous Papua through a critical dependency theory approach, focusing on the asymmetric relationship between peripheral and central regions. Using a political economy framework, the article argues that sustained dependency contributes to economic instability and vulnerability to poverty. Therefore, a strategic plan is necessary to establish an inclusive economic ecosystem as a pathway out of the grip of inflation.

Keywords: inflation, dependency, Mountainous Papua, political economy, local economy, inclusive economy

PENDAHULUAN

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah periferal di bagian timur Indonesia yang dikenal memiliki topografi ekstrem, dengan ketinggian mencapai lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut di beberapa titik seperti Puncak Trikora dan Puncak Mandala. Secara geografis, kawasan ini didominasi oleh bentang pegunungan dan perbukitan terjal yang diselingi lembah curam serta hutan tropis lebat. Kondisi geografis tersebut menjadikan sebagian besar wilayah Papua Pegunungan sulit dijangkau, baik melalui jalur darat maupun laut. Beberapa kabupaten, seperti Nduga, Yahukimo, Tolikara, dan Pegunungan Bintang, memiliki akses transportasi yang sangat terbatas. Umumnya, mobilitas masyarakat hanya dapat dilakukan melalui jalur udara atau dengan berjalan kaki. Keterbatasan aksesibilitas ini menyebabkan Papua Pegunungan relatif terisolasi dari pusat-pusat ekonomi nasional, sehingga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan terutama perekonomian.

Meskipun memiliki hamparan hutan tropis yang luas dan kaya sumber daya alam, tingkat ketergantungan Papua Pegunungan terhadap pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut terutama tampak pada kebutuhan pangan, bahan pokok, serta material bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2024, wilayah ini mencatat tren inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup tinggi. Sebagai provinsi baru di kawasan perifer, Papua Pegunungan menempati posisi tertinggi inflasi nasional, dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 5,05% dan IHK mencapai 110,78 pada Agustus 2024 (BPS Provinsi Papua, 2024a).

Selaras dengan data tersebut, Bank Indonesia (2024) dalam *Laporan Perekonomian Provinsi Papua* mencatat bahwa peningkatan inflasi di Papua Pegunungan terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat dan tingginya biaya logistik dari daerah pemasok menuju Papua Pegunungan. Selain itu, kesulitan operasional transportasi dan mahalnya biaya distribusi juga menjadi faktor pendorong utama. Di sisi lain, gejolak geopolitik global turut memicu kenaikan harga komoditas dunia yang berimbas pada inflasi regional.

Ketergantungan ekonomi seperti ini tidak hanya menjadikan Papua Pegunungan rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan inflasi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-budaya yang cukup besar. Ketidakmampuan masyarakat mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok berpotensi mengubah pola konsumsi mereka. Masyarakat cenderung beralih ke produk impor daripada memanfaatkan hasil produksi lokal. Perubahan ini dapat memicu erosi budaya dan hilangnya praktik tradisional dalam pengelolaan sumber

daya alam serta produksi pangan lokal. Dalam jangka panjang, ketergantungan yang terus meningkat berpotensi menghambat perkembangan ekonomi lokal, menurunkan produktivitas masyarakat, dan memperlemah kemandirian ekonomi Papua Pegunungan.

Padahal, provinsi baru ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan berkat ketersediaan lahan yang luas serta kekayaan sumber daya alamnya. Data BPS Provinsi Papua menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Papua Pegunungan. Pada tahun 2023, sektor ini mencatat nilai tambah sebesar 4,11 triliun rupiah atau sekitar 16,82% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Pegunungan. Dari angka tersebut, subsektor pertanian merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Papua Pegunungan memiliki potensi besar untuk menjadi sentra pertanian di kawasan timur Indonesia (BPS Provinsi Papua, 2024b, hlm. 3–4). Namun, apabila potensi dan kapasitas ekonomi lokal ini tidak dikelola secara optimal dan berkelanjutan, risiko inflasi akibat ketergantungan terhadap pasokan luar akan semakin besar, terutama di tengah percepatan pembangunan yang mengikuti penetapan wilayah ini sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sebagai DOB, Papua Pegunungan memiliki peluang untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendekatan kritis diperlukan untuk mengkaji berbagai bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Tanah Papua. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya berupaya menelaah laju inflasi dari perspektif ekonomi semata, tetapi juga menelusuri relasi antara kebijakan pembangunan, struktur kekuasaan, dan ketimpangan yang memicu ketergantungan ekonomi serta kerentanan inflasi di wilayah periferal seperti Papua Pegunungan. Lebih jauh, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika inflasi dalam perspektif ekonomi politik, sekaligus menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang berakar pada potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Papua Pegunungan.

KAJIAN PUSTAKA

Fenomena ketergantungan sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan memiliki keterkaitan erat dengan teori dependensi (*dependency theory*) yang dikemukakan oleh Theotonio dos Santos dan Paul Baran. Dalam karyanya *The Structure of Dependence*, dos Santos (1970) menjelaskan bahwa ketergantungan merupakan suatu kondisi di mana perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh ekspansi ekonomi negara lain yang lebih maju. Dalam situasi demikian, negara-negara berkembang sering kali bergantung pada negara-

negara maju untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketergantungan ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap inflasi akibat perubahan harga di pasar global (dos Santos, 1970, hlm. 232).

B.N. Ghosh dalam *Dependency Theory Revisited* (2019) memperluas pemahaman mengenai konsep ketergantungan dengan menyoroti bentuk-bentuk lain di luar dimensi ekonomi. Ia menyebut adanya ketergantungan akademik terhadap sistem pendidikan Barat, ketergantungan budaya yang mengarah pada krisis identitas, serta ketergantungan finansial terhadap arus modal dan pinjaman luar negeri. Lebih jauh, negara-negara periferal juga terikat oleh pola konsumsi yang didominasi oleh negara-negara maju, serta bergantung pada pasokan sumber daya manusia, teknologi, dan industri dari luar. Bahkan, kebijakan dalam negeri negara-negara berkembang sering kali dipengaruhi oleh intervensi negara maju melalui bantuan luar negeri dan mekanisme evaluasi kinerja ekonomi, yang secara tidak langsung turut memengaruhi inflasi dan stabilitas nilai tukar (Ghosh, 2019, hlm. 5–7).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Paul Baran dalam *The Political Economy of Growth* (1973), yang menegaskan bahwa relasi dominasi dan ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara periferal bukan sekadar hasil dari kondisi internal, melainkan merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi global yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme internasional. Dengan mengutip pemikiran Karl Marx, Baran menjelaskan bahwa kapitalisme global menciptakan sistem pembagian kerja internasional yang menempatkan negara maju sebagai pusat produksi industri dan teknologi, sementara negara terbelakang hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah atau tenaga kasar—ibarat "penebang kayu dan pengangkut air" dalam sistem ekonomi dunia yang berorientasi pada kepentingan asing (Ghosh, 2019, hlm. 18). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berlangsung pesat, sedangkan negara-negara periferal hanya mengalami perkembangan yang bersifat reflektif terhadap ekspansi tersebut (dos Santos, 1970, hlm. 232).

Meskipun teori pembangunan kapitalis mengakui pentingnya hubungan eksternal, teori ini sering gagal memahami keterbelakangan bukan sekadar akibat keterlambatan modernisasi, tetapi sebagai bagian integral dari mekanisme ekspansi kapitalisme global. Teori dependensi menegaskan bahwa perkembangan sosial dan ekonomi negara periferal sangat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, dan masuknya kapitalisme ke dalam struktur ekonomi lokal justru memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, selama hubungan ekonomi yang timpang tersebut tetap dipertahankan, ketergantungan akan terus berlanjut, menyebabkan stagnasi, kemiskinan, dan marginalisasi yang bersifat struktural.

Dalam konteks ekonomi modern, salah satu manifestasi dari ketergantungan tersebut adalah gejolak inflasi. Bank Indonesia (n.d.) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi biasanya dipengaruhi oleh dua tekanan utama, yaitu dari sisi penawaran (*cost-push inflation*) dan sisi permintaan (*demand-pull inflation*). *Cost-push inflation* terjadi ketika biaya produksi meningkat akibat depresiasi nilai tukar, dampak inflasi global, atau terganggunya distribusi barang. Sementara itu, *demand-pull inflation* muncul ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Dalam kondisi seperti ini, ekspektasi inflasi menjadi faktor penting dalam memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan proyeksi kebijakan dan situasi ekonomi masa depan. Selain itu, globalisasi, interaksi ekonomi internasional, kebijakan moneter, harga komoditas, serta struktur ekonomi domestik dan eksternal turut memengaruhi dinamika inflasi di negara-negara berkembang (Ha et al., 2020).

Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi adalah memperkuat basis ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat dikelola secara mandiri, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dalam konteks Papua Pegunungan, berbagai inisiatif pembangunan telah dilakukan untuk memperkuat perekonomian daerah, namun keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi kendala utama. Menurut kajian Bank Dunia (2022), peningkatan kemandirian ekonomi lokal berpotensi besar menekan dampak negatif ketergantungan impor dan gejolak inflasi di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini dapat dicapai melalui investasi strategis di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta melalui penguatan tata kelola dan reformasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena inflasi di Papua Pegunungan serta menganalisisnya dalam kerangka teori dependensi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi inflasi dan faktor-faktor penyebabnya, sedangkan pendekatan analitis-kritis diterapkan guna menelaah hubungan ketergantungan antara Papua Pegunungan dan pusat-pusat ekonomi nasional.

Sebagai studi kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan

Bank Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu inflasi, ketergantungan ekonomi, dan penguatan ekonomi lokal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis menggunakan perspektif ekonomi politik, dengan menjadikan teori dependensi sebagai pisau analisis utama. Untuk menghindari kecenderungan analisis yang bersifat monolitik atau semata-mata kritis tanpa solusi, penelitian ini juga berupaya merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang realistis dalam rangka menekan tingkat ketergantungan dan laju inflasi di wilayah-wilayah periferal seperti Papua Pegunungan.

Selain menelaah aspek ekonomi, penelitian ini turut memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan kebijakan lokal yang memengaruhi pola inflasi serta ketergantungan ekonomi masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, dan peran aktor ekonomi di tingkat lokal maupun nasional dianalisis untuk memahami kompleksitas permasalahan secara komprehensif. Dengan demikian, studi ini tidak semata berfokus pada indikator ekonomi, tetapi juga mengkaji interaksi antara kebijakan ekonomi nasional dan global dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, berbagai perubahan signifikan terjadi di seluruh Tanah Papua, baik yang berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya ketergantungan terhadap arah pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun lembaga internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua secara perlahan kehilangan otonomi dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan daerahnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan tersebut berkontribusi langsung terhadap tingginya laju inflasi di Papua Pegunungan dan berimplikasi pada penurunan produktivitas lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan, memperkuat basis produksi lokal, dan menekan inflasi guna menjaga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Ketergantungan sebagai Produk Kapitalisme

Pada pertengahan 1940-an, ekonom Raul Prebisch melalui perannya di *United Nations Economic Commission for Latin America (ECLA)* menemukan adanya relasi struktural antara negara maju (inti/core) dan negara berkembang (pinggiran/periphery). Negara-negara inti dicirikan oleh kekuatan serikat pekerja, upah tinggi, kemampuan memonopoli pasar ekspor manufaktur, serta elastisitas permintaan yang rendah terhadap impor. Sebaliknya, negara-negara periferal memiliki serikat pekerja yang lemah, upah rendah, pertumbuhan ekspor lambat, dan sangat bergantung pada impor (Ghosh, 2019, hlm. 10). Perbedaan ini menjadi dasar konseptual bagi pemahaman tentang ketergantungan ekonomi dalam sistem kapitalisme global.

Dari perspektif ekonomi politik, kapitalisme melahirkan hubungan saling ketergantungan yang bersifat asimetris antarnegara. Sistem ini menciptakan pasar dunia yang terintegrasi, di mana keuntungan dan pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di negara maju, sementara negara periferal mengalami stagnasi dan ketergantungan struktural. Paul Sweezy menegaskan bahwa pembangunan di bawah sistem kapitalisme global selalu menghasilkan kemajuan di satu kutub dan kemunduran di kutub lainnya (Ghosh, 2019, hlm. 35). Dengan demikian, ketergantungan tidak sekadar akibat keterlambatan pembangunan, melainkan merupakan produk langsung dari sistem kapitalisme yang mendominasi ekonomi dunia.

Fenomena globalisasi memperkuat situasi ini. Arus barang, jasa, dan informasi dari negara maju ke negara berkembang memperkenalkan pola konsumsi dan gaya hidup baru, yang mendorong pergeseran dari ekonomi subsisten menuju ekonomi pasar. Kebijakan perdagangan bebas yang diatur oleh organisasi internasional kerap menguntungkan negara maju, sementara negara berkembang menjadi pasar pasif bagi produk luar dan semakin bergantung pada impor. Dalam konteks tersebut, kapitalisme memang menciptakan peluang, tetapi sekaligus memperlebar ketimpangan ekonomi dan mengubah tatanan sosial-budaya lokal, termasuk preferensi konsumsi dan struktur pekerjaan. Akibatnya, masyarakat di wilayah periferal seperti Papua Pegunungan menjadi semakin terhubung dengan ekonomi global, namun kehilangan kemandirian ekonomi yang berbasis pada sumber daya dan budaya lokal.

Keterkaitan antara Ketergantungan dan Kerentanan Inflasi

Secara empiris, data statistik menunjukkan bahwa tingginya inflasi di Papua Pegunungan dipicu oleh mahalnya biaya distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta minimnya infrastruktur dan sarana transportasi. Topografi pegunungan yang sulit dijangkau menyebabkan biaya logistik

meningkat, sementara keterbatasan pasokan barang membuat harga mudah naik ketika permintaan meningkat. Selain itu, fluktuasi harga bahan bakar, tenaga kerja terbatas, dan kondisi cuaca ekstrem turut memperburuk rantai pasok, menyebabkan kelangkaan dan mendorong inflasi yang lebih tinggi.

Melalui perspektif ekonomi politik, situasi ini dapat dipahami sebagai akibat dari ketergantungan terhadap sistem kapitalisme global yang mendominasi produksi dan distribusi barang. Mengutip Paul Baran (1973, hlm. 32), ekspansi kapitalisme ke dalam ekonomi domestik akan melemahkan kerajinan tangan tradisional dan industri kecil berbasis rumah tangga. Dalam konteks Papua Pegunungan, masuknya kapitalisme melalui arus globalisasi telah menggeser masyarakat dari pola hidup subsisten ke pola hidup konsumtif dan modern.

Kebutuhan terhadap barang-barang impor kini menjangkau hingga wilayah pedalaman, membentuk persepsi baru tentang kemudahan dan kenyamanan hidup. Sebagaimana dikemukakan Swinnen (2018), gaya hidup modern sering dianggap lebih praktis dibandingkan dengan pola hidup tradisional yang menuntut ketahanan dan kerja keras fisik. Penelitian Gatoet Hardono (2014) menunjukkan adanya penurunan konsumsi pangan lokal di wilayah-wilayah timur Indonesia, termasuk Papua, yang diiringi peningkatan konsumsi produk berbasis terigu dan olahannya.

Keterikatan emosional masyarakat terhadap produk-produk kapitalisme tersebut semakin memperkuat ketergantungan dan membuka peluang bagi eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga kerja murah oleh korporasi besar. Dalam sistem kapitalisme global, stabilitas produksi dan ekspor lebih diutamakan daripada keberlanjutan sosial dan ekologis. Akibatnya, wilayah seperti Papua Pegunungan terus terjebak dalam siklus ketergantungan ekonomi tanpa perlindungan kebijakan yang memadai.

Hingga saat ini, kebijakan nasional maupun daerah belum sepenuhnya memberikan proteksi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di tengah arus investasi besar-besaran, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan. Keterlibatan pelaku ekonomi lokal juga masih terbatas, sehingga potensi daerah tidak berkembang optimal. Kondisi ini semakin memperkuat ketergantungan terhadap sistem kapitalisme global dan menjadikan Papua Pegunungan rentan terhadap fluktuasi inflasi.

Strategi Menepis Bayang-Bayang Inflasi

Papua Pegunungan dikenal sebagai wilayah dengan topografi ekstrem dan tingkat aksesibilitas terendah di Indonesia. Berbagai indikator—seperti tingkat

kemiskinan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur—menunjukkan ketertinggalan yang cukup tajam dibandingkan wilayah lain. Namun di balik keterbatasan tersebut, wilayah ini menyimpan potensi ekonomi lokal yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan jasa lingkungan. Sayangnya, sebagian besar kebijakan pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan konteks sosial dan ekologis wilayah pegunungan.

Dalam menghadapi realitas tersebut, inspirasi pemikiran Paul Baran dalam *The Political Economy of Growth* (1973) dapat dijadikan pijakan. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi surplus dan pemanfaatan sumber daya yang efektif melalui tiga cara: (1) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang belum tergarap, seperti tenaga kerja, lahan, dan modal; (2) reformasi kebijakan dan kelembagaan ekonomi; serta (3) peningkatan kapasitas pendidikan, teknologi, dan modal untuk mengalihkan konsumsi ke arah yang lebih produktif.

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat beberapa langkah strategis untuk mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan kemandirian ekonomi di Papua Pegunungan, yaitu:

1. Optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif dan produktif. Efisiensi dalam perencanaan dan penyerapan anggaran publik perlu diperkuat agar dampaknya langsung terasa terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi regional. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi kunci agar penggunaan anggaran mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menekan laju inflasi.
2. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada *green economy*, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian Wahid Rauf & Martina Sri Lestari (2009) menunjukkan bahwa dukungan teknologi tepat guna, transportasi memadai, dan sistem pemasaran yang kuat dapat mempercepat pengembangan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas luar daerah.
3. Diversifikasi dan penguatan ekonomi lokal. Pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perkebunan, industri kecil, dan koperasi menjadi strategi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing lokal. Temuan Muhamad Ismail (2015) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi, dengan dukungan pelatihan dan dana stimulan dari OTSUS maupun APBN, dapat meningkatkan produktivitas serta memperluas basis ekonomi rakyat.

4. Peningkatan literasi dan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global. Pemahaman terhadap kebijakan ekonomi internasional sangat penting karena banyak kebijakan global memperkuat posisi dominan negara maju dan melemahkan ekonomi negara periferal (Fineman, 2004). Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistemik di tingkat lokal dan nasional agar ekonomi daerah lebih adaptif terhadap perubahan global dan tidak mudah tertekan oleh inflasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Papua Pegunungan memiliki peluang untuk keluar dari jerat ketergantungan struktural dan membangun sistem ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, serta berkelanjutan—sebuah prasyarat penting untuk menstabilkan inflasi dan memperkuat kemandirian wilayah periferal di tengah arus kapitalisme global.

KESIMPULAN

Melihat Papua semata-mata sebagai wilayah tertinggal yang perlu "dibangun" melalui paradigma kapitalistik justru memperkuat lingkaran ketergantungan dan menghambat potensi kemandirian masyarakatnya. Perspektif pembangunan semacam ini tidak hanya menumbuhkan budaya konsumtif di Tanah Papua, tetapi juga melemahkan kapasitas produktif masyarakat setempat. Dalam konteks Papua Pegunungan, fenomena inflasi yang terus berulang merupakan refleksi langsung dari ketergantungan struktural terhadap sistem ekonomi global, di mana hubungan antara negara maju dan negara pinggiran menciptakan ketidakseimbangan yang sulit diputus.

Melalui analisis kritis berbasis ekonomi politik, penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi tidak hanya memengaruhi kestabilan harga dan pertumbuhan, tetapi juga berdampak luas terhadap keberlanjutan pembangunan, kerusakan ekologi, serta hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Papua Pegunungan. Oleh karena itu, sistem kebijakan dan birokrasi pembangunan di wilayah ini perlu ditata ulang agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, dengan menempatkan pelestarian sosial-budaya dan lingkungan hidup sebagai inti dari strategi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

Adrison, V. & Flukeria, M., 2016. Lowering regional inflation? Improve budget absorption. *Economics and Finance in Indonesia*, 62(2), pp.67–77.

Asnuryati, 2023. Strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa: Mendorong pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), pp.2175–2183.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2024. *Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025–2029*. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, 2024. *Statistik Daerah Provinsi Papua Pegunungan 2024*. Jayapura: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2024. *Provinsi Papua Pegunungan dalam Angka 2024*. Vol. 1. Jayapura: BPS.

Bank Indonesia, n.d. *Inflasi*. [online] Available at: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx[Accessed 28 Oct. 2024].

Bank Indonesia, 2024. *Laporan Perekonomian Provinsi Papua*, 5(5), Mei 2024. Jakarta: Bank Indonesia.

Baran, P.A., 1973. *The Political Economy of Growth*. New York, NY: Monthly Review Press.

Baran, P.A. & Sweezy, P.M., 1966. *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order*. New York: Monthly Review Press.

Bernholz, P., 2003. *Monetary Regimes and Inflation: History, Economic and Political Relationships*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

dos Santos, T., 1970. The structure of dependence. *The American Economic Review*, 60(2), pp.231–236.

Fineman, M.A., 2004. *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*. New York: The New Press.

Ghosh, B.N., 2019. *Dependency Theory Revisited*. New York: Routledge.

Habib, M.H., 2024. Studi ragam perspektif kebijakan pangan di Indonesia. *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal*, 1(1), pp.34–42.

Ha, J., Kose, M.A. & Ohnsorge, F. (eds.), 2020. *Inflation in Emerging and Developing Economies: Evolution, Drivers, and Policies*. Washington, DC: World Bank.

Hardono, G.S., 2014. Strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), pp.1–17.

Ismail, M., 2015. Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua. *Jurnal Bina Praja*, 7(3), pp.251–260.

Rauf, A.W. & Lestari, M.S., 2009. Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif di Papua. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(2).

Rosset, P., 2008. Food sovereignty and the contemporary food crisis. *Development*, 51(4).

Sulistyowati, E. & Rahman, M., 2020. Tantangan pembangunan ekonomi di daerah terpencil. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 15(1), pp.45–58.

Swinnen, J., 2018. *The Political Economy of Agricultural and Food Policies*. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Todaro, M.P. & Smith, S.C., 2015. *Economic Development*. London: Pearson.

World Bank, 2022. *The Future of Regional Development: Building Economic Resilience*. Washington, DC: World Bank Publications.